



## **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.269.299.011.031,51	
b. Belanja	Rp	(1.108.734.378.343,00)	
c. Transfer	Rp	(113.183.225.241,00)	
Surplus			Rp 47.381.407.447,51
d. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	84.278.914.209,18	
- Pengeluaran	Rp	(1.000.000.000,00)	
Pembiayaan Netto			Rp 83.278.914.209,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp 130.660.321.656,69

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp14.463.580.705,49 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.283.762.591.737,00
  2. Realisasi Rp (1.269.299.011.031,51)
  - Lebih / (Kurang) Rp 14.463.580.705,49
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp143.130.957.038,63 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.251.865.335.381,63
  2. Realisasi Rp (1.108.734.378.343,00)
  - Lebih / (Kurang) Rp 143.130.957.038,63
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp1.985.481.244,55 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 115.168.706.485,55
  2. Realisasi Rp (113.183.225.241,00)
  - Lebih / (Kurang) Rp 1.985.481.244,55
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp130.652.857.577,69) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran setelah perubahan Rp (83.271.450.130,18)
  2. Realisasi Rp (47.381.407.447,51)
  - Lebih / (Kurang) Rp (130.652.857.577,69)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp7.464.079,00) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran setelah perubahan Rp 84.271.450.130,18
  2. Realisasi Rp (84.278.414.209,18)
  - Lebih / (Kurang) Rp (7.464.079,00)
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
  2. Realisasi Rp (1.000.000.000,00)
  - Lebih / (Kurang) Rp 0,00
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp7.464.079,00) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran setelah perubahan Rp 83.271.450.130,18
  2. Realisasi Rp (83.278.914.209,18)
  - Lebih / (Kurang) Rp (7.464.079,00)

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Saldo anggaran lebih awal	Rp	84.271.450.130,18
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(84.274.414.209,18)
Sub Total	Rp	(2.964.079,00)
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	130.660.321.656,69
Sub Total	Rp	130.657.357.577,69
4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	2.964.079,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	130.660.321.656,69

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	1.223.700.739.949,45
b. Jumlah kewajiban	Rp	7.446.555.209,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	1.216.254.184.740,45

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan- LO	Rp	1.257.896.997.299,24
b. Beban Operasi	Rp	(1.081.480.190.978,58)
c. Beban Transfer	Rp	(48.863.436.241,00)
d. Beban Luar Biasa	Rp	(260.335.000,00)
e. Surplus/defisit-LO	Rp	127.293.035.079,66

#### **Pasal 7**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015	Rp	84.274.414.209,18
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	246.359.244.096,51
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(198.977.836.649,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(995.500.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
f. Saldo kas akhir di Bendahara Umum Daerah	Rp	130.660.321.656,69
g. Saldo kas akhir di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
h. Saldo kas akhir di Bendahara Pengeluaran	Rp	130.660.321.656,69

#### **Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 1.633.857.243.119,05
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 127.293.035.079,66
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (544.896.093.458,26)
d. Ekuitas Akhir	Rp 1.216.254.184.740,45

### **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 10**

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
  - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
  - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
  - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Laporan operasional;
- d. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- d. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- d. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 11**

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 20 Sept 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**ttd**

**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 20 Sept 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**ttd**

**HADI WINARNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016  
NOMOR 2**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (103/2016)**